

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kecerdasan rata-rata siswa di Indonesia di tingkat dunia, hanya menduduki posisi ke 34 (Muhammad Zen, 2010: 41). Senada dipaparkan oleh Bahrul Hayat & Yusuf Suhendra (2010: 100) dalam benchmark internasional tercatat negara yang paling banyak memiliki guru berpendidikan universitas (minimal 90%), berturut-turut adalah Taiwan, Denmark, Georgia, Hongaria, Belanda, Norwegia, Polandia, Qatar, Republik Slovakia, Amerika Serikat dan Kanada. Kecenderungan internasional ini jelas jauh lebih tinggi dari Indonesia, hanya 16% guru yang berpendidikan universitas.

Menurut Dedi Mulyasana (2012: 120) pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik (*good planning system*) dengan materi dan sistem tata kelola yang baik (*good governance system*) dan disampaikan oleh guru yang baik (*good teachers*) dengan komponen pendidikan yang bermutu, khususnya guru. Senada dengan hal tersebut dalam Permendiknas nomor 63 tahun 2009 dipaparkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional. Bukan hanya mutu pendidikan, tetapi perlu ditetapkan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan secara sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan.

Pendidik atau guru yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan profesinya sangat diperlukan. Profesi guru saat ini mulai diakui dan diminati oleh berbagai masyarakat. Banyak masyarakat yang ingin menjadi guru setelah adanya sertifikasi guru dari berbagai latar belakang ilmu. Namun tidak bisa dipungkiri banyak permasalahan yang muncul pasca adanya kebijakan ini. Selain hal tersebut menurut Enco Mulyasa (2007: 5) guru merupakan komponen yang berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberi sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. Satu upaya peningkatan kualitas guru guna menunjang kompetensi guru, pemerintah melakukan program sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan bagian dari peningkatan mutu kompetensi profesional guru dan peningkatan kesejahteraan guru.

Sertifikasi guru menuntut prasyarat minimal seorang guru berijazah S1 yang dibuktikan dengan sertifikat. Menurut data Balitbang kualifikasi guru menurut ijazah terakhir sejumlah dari 230.114 guru SMA yang berkualifikasi Sarjana hanya 72,75%. Peningkatan kualitas minimum guru sangat baik sebagai upaya peningkatan mutu, tetapi dari segi pelaksanaannya akan banyak menemui kesulitan khususnya bagi kualifikasi guru (Trianto, 2010: 47). Sampai saat ini pemerintah berupaya untuk memberikan pendidikan bagi guru yang belum S1 dan mengatur syarat menjadi guru sekurang-kurangnya harus berpendidikan S1. Jadi, diharapkan melalui aturan tersebut mampu

meningkatkan mutu pendidikan. Berdasarkan paparan data di atas maka terindikasi profesionalitas guru di Indonesia masih rendah.

Selain permasalahan kualifikasi guru kemampuan menulis guru masih sangat rendah. Data menyebutkan dari 1.461.124 guru saat ini, ditinjau dari golongan atau ruang kepangkatan guru tercatat sebanyak 22,87% guru golongan IVA. Berdasarkan jenjang kepangkatan guru pada golongan atau ruang IVA ke atas menurut status tempat tugasnya tercatat sebanyak 3,06% merupakan guru SMA (Kunandar, 2011: 63). Fakta di lapangan masih banyak guru yang kurang memiliki kemauan untuk membuat karya tulis. Kemampuan guru menulis pun masih sangat rendah terbukti dari sedikitnya modul pembelajaran yang dibuat guru.

Fakta maupun persepsi saat ini, masih banyak kalangan yang meragukan kompetensi guru baik dalam bidang studi yang diajarkan maupun bidang lain yang mendukung terutama bidang didaktik dan metodik pembelajaran. Keraguan ini cukup beralasan karena didukung oleh hasil uji kompetensi yang menunjukkan masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Uji Kompetensi Awal guru tahun 2012 secara nasional masih sangat rendah dengan rata-rata 42,25 dengan nilai tertinggi 97,0 dan nilai terendah 1,0. Hasil rata-rata tersebut mencakup seluruh peserta dari jenjang TK sampai jenjang SMA (*Kompas, 16 Maret 2012*). Uji kompetensi ini juga menunjukkan bahwa masih banyak guru yang tidak menguasai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kesimpulan lain yang cukup mengejutkan dari studi tersebut di antaranya

adalah bahwa pembelajaran di kelas lebih didominasi oleh ceramah satu arah dari guru dan sangat jarang terjadi tanya jawab. Ini mencerminkan betapa masih banyak guru yang tidak berusaha meningkatkan dan memutakhirkan profesionalismenya.

Semua guru akan berusaha mendapatkan sertifikat. Hal ini didorong oleh konsekuensi logis yang menyertainya yakni satu kali gaji pokok. Secara tidak langsung ini mampu meningkatkan kesejahteraan guru. Logikanya seorang guru akan berusaha sekuat tenaga, pikiran, dan bahkan uang demi mendapatkan sertifikasi. Ketika semua guru berpandangan tunjangan hanya konsekuensi sunnah yang menyertai kemampuan tersebut, maka tidak ada yang kemudian mencari jalan pintas dalam pemenuhan prasyarat kebijakan ini. Jadi, sertifikasi benar-benar akan berdampak positif dalam meningkatkan kualitas guru itu sendiri.

Sebagian guru dirasa belum siap menghadapi kebijakan sertifikasi yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, karena hasil penelitian sejauh ini yang justru berbicara sebaliknya. Senada diungkapkan Muhammad Zen (2010:33) semakin cepat memperoleh sertifikasi, tambahan penghasilan akan cepat didapat. Maka muncul problem baru, seorang guru akan berusaha sekuat tenaga, pikiran, dan bahkan uang demi mendapatkan sertifikasi. Target pencapaian skor 850 poin pada portofolio guru, bisa jadi sangat rawan di manipulasi. Terutama pembuktian mengikuti suatu kegiatan ilmiah yang hanya didasarkan lewat selebar sertifikat kesertaan. Selain itu, semakin merebaknya pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh guru.

Melalui program sertifikasi guru ini pemerintah berharap terjadinya peningkatan mutu pendidikan. Namun kebijakan sertifikasi guru kemudian melahirkan isu yang mencederai citra guru. Selain itu permasalahan teknis pun dirasa di bebaskan kepada guru dengan adanya prasyarat 24 jam mengajar yang mengakibatkan mobilisasi guru semakin tinggi. Pelaksanaan sertifikasi guru sedikit menimbulkan berbagai masalah. Peningkatan kualitas guru yang tidak menunjukkan adanya peningkatan signifikan melahirkan berbagai permasalahan di sekolah seperti kecemburuan sosial.

Realitanya hal ini terjadi di SMA N 11 yang mampu mempengaruhi interaksi sosial guru. SMA N 11 memiliki 47 PNS, 8 Naban, dan 11 GTT. Dari 47 guru terdapat 6 guru yang kurang dari 24 jam, 2 guru menduduki jabatan wakil kepala sekolah dan 4 guru sisanya mencari tambahan di sekolah lain. Hal ini meningkatkan mobilisasi guru lebih tinggi. Interaksi guru pun menjadi terbagi karena dalam seminggu waktu guru terbagi antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Jadi, hanya tersisa 41 guru dan dari 41 guru ada yang merangkap sebagai waka sebanyak 4 guru dan wali kelas sebanyak 6 guru. Sehingga total guru yang bebas dari tugas tambahan untuk mendapatkan tunjangan profesi ada 31 guru. Hal ini kemudian melahirkan permasalahan yang menarik untuk diteliti dalam kaitannya dengan hubungan sosial mereka di sekolah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Profesionalisme sebagian guru-guru di Indonesia belum tinggi.
2. Sebagian guru belum memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya.
3. Sebagian guru belum siap menghadapi kebijakan sertifikasi.
4. Adanya kebijakan sertifikasi melahirkan fenomena menarik dan penting digali di sekolah dalam hubungannya dengan interaksi sosial sesama guru.

C. Pembatasan Masalah

Cakupan masalah yang dibatasi pada fenomena sertifikasi guru dalam hubungannya dengan interaksi sosial di SMA N 11 Yogyakarta. Jadi peneliti hanya akan melihat interaksi sosial guru dalam hubungannya dengan sertifikasi guru, serta faktor yang mempengaruhi berjalannya interaksi tersebut.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena sertifikasi guru dalam hubungannya dengan interaksi sosial di SMA N 11 Yogyakarta?
2. Apa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi fenomena sertifikasi guru dalam hubungannya dengan interaksi sosial di SMA N 11 Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui gambaran fenomena sertifikasi guru dalam hubungannya dengan interaksi sosial yang terjadi di SMA N 11 Yogyakarta
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan sertifikasi guru dalam hubungannya dengan interaksi sosial yang terjadi di SMA N 11 Yogyakarta

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut diatas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Untuk kajian ilmiah hasil ini diharapkan dapat berguna bagi penelitian-penelitian dengan tema yang sama atau relevan sehingga dapat memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu sosiologi pada khususnya dan ilmu sosial pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, memberi bekal pengalaman untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama di bangku kuliah kedalam karya nyata
- b. Bagi masyarakat sekolah sebagai referensi dan informasi tambahan yang harapannya semakin meningkatkan persatuan sesama warga sekolah

- c. Bagi almamater, sebagai tolak ukur daya serap mahasiswa yang bersangkutan selama menempuh pendidikan dan kemampuan menerapkan ilmunya secara praktis.
- d. Bagi mahasiswa lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi atau kajian untuk pengembangan penelitian selanjutnya.